



LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR

KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH
NGLINDUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.
16. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 326/KPTS/2023 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan Dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Panewu Girisubo Nomor 052 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan

- Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglindur Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglindur Tahun 2022-2027;
 19. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR
Dan
LURAH NGLINDUR,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.431.125.100
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp</u>	<u>2.492.365.470,92</u>
Surplus/Defisit	Rp	(61.240.370,92)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.240.370,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0</u>
c. Pembiayaan Netto	Rp	61.240.370,92
Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

- Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

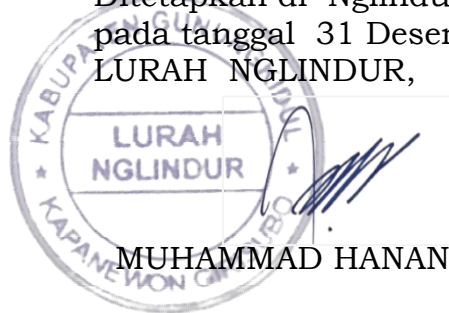
Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglindur.

Ditetapkan di Nglindur
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH NGLINDUR,



MUHAMMAD HANAN AMSHORI

Diundangkan di Nglindur
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK NGLINDUR,




RINA NUR HASANAH
LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.411.025.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.431.125.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	728.898.860,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.488.495,00	
5.3.	Belanja Modal	868.778.115,92	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.492.365.470,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.240.370,92)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.240.370,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.240.370,92	
	PEMBIAYAAN NETTO	61.240.370,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLINDUR , 27 March 2025



MUHAMMAD HANAN AMSHORI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.411.025.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.431.125.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.034.855.656,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	841.073.760,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	568.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	568.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.503.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.503.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.140.000,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.140.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.311.120,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.311.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.103.780,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.103.780,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.948.247,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	60.934.301,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	60.934.301,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.013.946,00	DLL, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.013.946,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.018.750,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.575.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.168.750,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.168.750,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.275.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.314.899,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.829.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.829.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.000.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.335.579,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.335.579,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.100.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.399.000,00	PBP
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.399.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.390.820,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.390.820,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.880.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.880.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	4.750.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	22.630.000,00	DDS
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.630.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>981.906.999,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	132.313.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.520.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.520.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	26.103.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.103.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	28.790.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.790.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	514.093.999,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	106.094.499,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	106.094.499,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	106.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	105.375.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	139.840.500,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	139.840.500,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	162.159.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	162.159.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	325.750.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.750.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.750.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>329.749.815,92</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.700.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.700.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.750.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.725.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.725.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.025.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.025.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	296.374.815,92	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	294.374.815,92	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	294.374.815,92	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PAD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.225.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.225.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>76.653.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	69.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	2.000.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.653.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.653.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.653.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>69.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.492.365.470,92	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61.240.370,92)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.240.370,92	
		PEMBIAYAAN NETTO	61.240.370,92	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGLINDUR, 27 March 2025

LURAH

MUHAMMAD HANAN AMSHORI